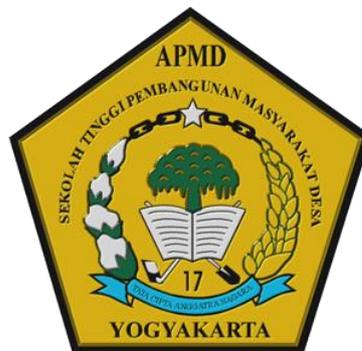


**KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah



disusun oleh:

BIMO CHRISTANO MENTARA

19610053

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

TESIS

**KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

Oleh:

BIMO CHRISTANO MENTARA

19610053

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal, 14 Februari 2022

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)

Dr. Yuli Setyowati, M.Si

.....

Penguji I

Dr. Supardal, M.Si

.....

Penguji II

Dr. Sugiyanto, S.Sos

.....

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Mengetahui

Direktur Program Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BIMO CHRISTANO MENTARA

NIM : 19610053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19” adalah karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan

BIMO CHRISTANO MENTARA
NIM : 19610053

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Pertama, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan penyertaan-Nya selama hidup penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister.

Kedua, kepada Papa, Mama, Adik, Pacar, Sahabat, serta keluarga besar saya yang selalu memotivasi dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.

MOTTO

***”Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka
mendatangkan kekurangan saja”***

(Amsal 14:23)

***“Bukti utama kebesaran sejati manusia adalah
persepsi akan kekecilan dirinya”***

(Sherlock Holmes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis ini yang berjudul : *KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19.*

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Pemerintahan Daerah di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta.

Terselesainya penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran-saran yang berguna dalam penyusunan tesis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Yuli Setyowati, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi sampai terselesainya tesis ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat dan Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta, yang telah membekali banyak ilmu, terutama kajian mengenai ilmu pemerintahan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang membantu penulis dalam proses observasi dan pengumpulan data untuk penulisan tesis ini.

4. Bapak Ahdar Ismail selaku Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa yang telah meluangkan waktu dan kesempatan penulis selama penelitian.
5. Pemerintah Desa Bariri, yaitu Kepala Desa Bariri, Ibu Magdalena Mentara dan Bendahara Desa, Satrianus Masoke yang membantu penulis dalam mengolah data dan memberi informasi terkait tesis ini.
6. Bapak, Ibu, dan Saudara mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Angkatan XXIV yang menjadi orangtua serta sahabat selama penulis menempuh kuliah.
7. Raqka Fauzi Rahmatullah dan Ezarestha Ivandrio sebagai sahabat dan saudara penulis.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu dalam membantu penulis menyusun tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan tesis ini tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan, maupun rintangan, sehingga tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah wacana pemikiran bagi semua pihak yang berminat pada penelitian pada bidang ilmu pemerintahan.

Yogyakarta, Februari 2022

Penulis,

BIMO CHRISTANO MENTARA

NIM: 19610053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Fokus Penelitian	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Tujuan Penelitian	9
	E. Kerangka Konseptual	9
	1. Kinerja	9
	2. Pemberdayaan Masyarakat	15
	F. Metode Penelitian	22
	1. Jenis Penelitian	22
	2. Obyek Penelitian	23
	3. Lokasi Penelitian	23
	4. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian	23
	5. Teknik Pengumpulan Data	24
	6. Teknik Analisis Data	26
	7. Validitas Data.....	28
BAB II	PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH	30
	A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	30
	1. Tugas	30

2. Fungsi.....	30
3. Struktur Organisasi.....	31

BAB III	ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH	39
	A. Produktivitas.....	42
	B. Kualitas Layanan.....	60
	C. Responsivitas.....	68
	D. Responsibilitas.....	73
	E. Akuntabilitas.....	75
	F. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Poso.....	89
	G. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19.....	92
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Keterbatasan Penelitian.....	102
	C. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
Tabel 1.1	Perbandingan Penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain	7
Tabel 3.1	Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kabupaten Poso	47
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan untuk Meningkatkan Usaha Perekonomian Masyarakat serta Pendapatan Asli Desa	51
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	52
Tabel 3.4	Beban Kerja Utama Seksi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Poso	57
Tabel 3.5	Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kabupaten Poso	62
Tabel 3.6	Skala Nilai Peringkat Kinerja (LAKIP Dinas PMD)	75
Tabel 3.7	Sasaran Strategis Dinas PMD Kabupaten Poso	76
Tabel 3.8	Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kabupaten Poso	77
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Program Dinas PMD Kabupaten Poso	78
Tabel 3.10	Anggaran Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Tahun 2020	80
Tabel 3.11	Anggaran Belanja Dinas PMD Tahun 2020	83
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Dinas PMD Tahun 2020	84
Tabel 3.13	Kriteria Rasio Efektivitas	85
Tabel 3.14	Kriteria Rasio Efisiensi	86

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Poso	31
Gambar 3.1	Komposisi Esselonering Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43
Gambar 3.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas PMD	44
Gambar 3.3	Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Golongan	44
Gambar 3.4	Poso Dilanda Banjir dan Tanah Longsor	69
Gambar 3.4	Teroris MIT di Poso di Hutan dan Pegunungan	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa, Ahdar Ismail, ST, M.Si.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Poso Tahun 2020.
3. Dokumentasi selama penelitian.

INTISARI

Pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sudah dilakukan serentak di era pemerintahan saat ini. Akan tetapi masih terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso terkendala akibat beberapa pendamping desa tidak aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu perlu untuk mengkaji kinerja perangkat daerah selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berpartisipasi secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat desa. Permasalahannya adalah jangkauan dari pelaksanaannya sudah merata atau belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian mengenai kinerja perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan melakukan penelitian secara langsung guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Ada tiga orang informan utama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dan diuji validitasnya melalui triangulasi. Guna menetapkan keabsahan data yang diperlukan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dari Dimensi produktivitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso diketahui tidak produktif dan tidak efisien karena waktu kerja efektifnya selama 640,83 jam.. Dimensi kualitas layanan, telah terdapat keterbukaan informasi dari Dinas PMD Kabupaten Poso sendiri mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang diinformasikan. Dimensi responsivitas, Dinas PMD Kabupaten Poso cukup baik dalam penentuan strategi pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dimensi tanggung jawab, meskipun secara pendidikan sudah memadai, masih terdapat permasalahan yakni pemahaman pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara ataupun tenaga honorer terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih tergolong rendah sehingga pekerjaan diselesaikan oleh pegawai tertentu saja. Dimensi akuntabilitas, dari perhitungan efektivitas dan efisien menunjukkan bahwa secara efektivitas anggaran dan realisasi belanja Dinas PMD Kabupaten Poso sudah efektif dengan persentase 90,2 persen. Tetapi dalam segi efisiensi anggaran dan realisasi masih tidak efisien dengan persentase 35,03 persen. Dari kelima dimensi tersebut terdapat pula faktor yang mempengaruhi Dinas PMD dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso baik internal maupun eksternal.

Kata Kunci: kinerja perangkat daerah, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Community empowerment in the midst of the COVID-19 pandemic has been carried out simultaneously in the current government era. However, there are still several community empowerment programs in Poso Regency which are constrained due to some village assistants not being active in carrying out their duties and functions. For this reason, it is necessary to examine the performance of regional apparatus as an extension of the regional government that participates directly in empowering village communities. The problem is that the range of implementation is even or not evenly distributed. This study aims to examine the performance of the Community and Village Empowerment Office of Poso Regency regarding the implementation of community empowerment during the pandemic, the factors that affect community empowerment in Poso Regency.

The method used in this study is a qualitative descriptive study with the object of research on the performance of regional apparatus, namely the Community and Village Empowerment Service in the midst of the COVID-19 pandemic in Poso Regency, Central Sulawesi by conducting direct research to find out the actual condition or condition of the object used. will be researched. There are three main informants in this study. Data collection techniques in this study are by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used by the researcher is data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. In this study, the data collected was processed and tested for validity through triangulation. In order to determine the validity of the data required, the data checking technique is based on a number of certain criteria.

The results of this study indicate that the implementation of community empowerment by the Poso Regency Community and Village Empowerment Service from the productivity dimension, the Poso Regency Community and Village Empowerment Service is known to be unproductive and inefficient because of its effective working time of 640.83 hours. there is disclosure of information from the PMD Office of Poso Regency itself regarding the requirements and service procedures for each type of service that is informed. Dimensions of responsiveness, the PMD Office of Poso Regency is quite good in determining village development strategies and community empowerment. The dimension of responsibility, although education is adequate, there are still problems, namely the understanding of employees, whether it is the State Civil Apparatus or honorary staff, on the main tasks and functions that are still relatively low so that the work is completed only by certain employees. The accountability dimension, from the calculation of effectiveness and efficiency, shows that the effectiveness of the budget and realization of the expenditure of the PMD Office of Poso Regency has been effective with a percentage of 90.2 percent. However, in terms of budget efficiency and realization, it is still inefficient with a percentage of 35.03 percent. Of the five dimensions, there are also factors that influence the PMD Office in community empowerment in Poso Regency, both internally and externally.

Keywords: regional apparatus performance, community empowerment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan nasional pada hakikatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana tentunya harus sejalan dengan pembangunan mental manusia. Dari situlah muncul suatu pendekatan yang digunakan dewasa ini yaitu “pemberdayaan” yang perannya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya.

Pendekatan *top-down* tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat yang mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberikan kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang mereka butuhkan sendiri. Sementara pemerintah mempunyai peran mendukung serta memfasilitasi proses tersebut. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki.

Pemberdayaan masyarakat bukan sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut Dwi Iriani Margayaningsih (2018:171) secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dimana

kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilihan modal, akses ke pasar, dan ke dalam sumber-sumber informasi serta keterampilan manajemen.

Merealisasikan demokrasi ekonomi yang terus berjalan, tentu aspirasi masyarakat yang tertampung harus dinyatakan melalui kegiatan-kegiatan nyata. Dalam realisasi kegiatan nyata tersebut, negara memiliki birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, tentunya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan kebijakan publik dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai landasan hukum terkait pemberdayaan masyarakat mengamatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta kawasan perdesaan (Pasal 112 Ayat 3). Namun dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), inspektorat, dinas, badan dan kecamatan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Artinya, dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yaitu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi sendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan penyelenggaraan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah agar upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak luput dari tantangan dalam prosesnya. Saat ini Indonesia sedang menghadapi wabah COVID-19 (*Corona Virus Disease-19*) yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi dan kesehatan di setiap daerah. Seperti yang kita ketahui pandemi ini berdampak pada aspek-aspek kehidupan masyarakat dan efeknya ialah peningkatan jumlah kemiskinan di Perdesaan dari 14,16 % pada bulan September 2019 menjadi 14,77 % di bulan Maret 2020 yang berarti terjadi penambahan sebanyak 119.120 jiwa. Kemudian di tingkat perkotaan dari 6,77 % pada bulan September 2019 menjadi 7,89 % di bulan Maret 2020 yang berarti terjadi penambahan sebanyak 243.000 jiwa. Peningkatan jumlah kemiskinan ini harus diatasi dengan strategi yang tepat yaitu dengan dioptimalkannya Dana Desa untuk ekonomi dan ketahanan masyarakat desa. Dengan mewabahnya COVID-19, dana desa difokuskan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan wabah dan bantuan Langsung Tunai (BLT).(jatimprov.go.id)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Poso Sulawesi Tengah selaku perangkat daerah terus memantau proses penyaluran

BLT Dana Desa. Dilansir dari media *online* lokal *Posoline.com*, Dinas PMD Kabupaten Poso yang berkapasitas sebagai pembina dan pendampingan dalam penyaluran dana BLT yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat. Pemberian bantuan tersebut atas kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 14 April 2020 Nomor :1261/PRI.00/IV/2020 terkait petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT DD. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa (Pasal 24). Kepala Dinas PMD Kabupaten Poso, Lusiana Sigilipu menuturkan bahwa penyaluran bantuan tunai itu sebelumnya sudah melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

Pemberitaan mengimplikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sudah dilakukan akan tetapi perlu untuk dikaji terutama kinerja perangkat daerah selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berpartisipasi secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat desa. Permasalahannya adalah jangkauan dari pelaksanaannya sudah merata atau belum merata.

Kinerja Dinas PMD tak lepas dari permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pengelolaan dana desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso menyebutkan bahwa 80 persen pendamping desa di Kabupaten

Poso tidak aktif mendampingi desa sebagaimana tupoksinya yaitu mendampingi desa dalam pengelolaan dana desa. Pemberitaannya sebagai berikut.

Sekretaris Kabupaten Poso Sebut 80 Persen Pendamping Desa Tidak Aktif

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso Yan Guluda mengatakan sekitar 80 persen sarjana pendamping yang ada di 142 desa di Poso, Sulawesi Tengah, diduga tidak optimal melaksanakan tugas pendampingan terhadap dana desa yang merupakan tupoksi mereka.

"Setelah kami melakukan pertemuan dengan beberapa kepala desa di dua kecamatan di wilayah Pamona Bersaudara pada minggu kemarin, dari pengakuan Kades bahwa pendamping desa banyak yang tidak bekerja optimal melaksanakan tupoksinya, mendampingi desa terkait dengan adanya dana desa," kata Yan, Senin (7/10).

la juga mengatakan bahwa laporan terhadap kinerja para pendamping desa ini telah dikeluhkan oleh sejumlah Kades kepadanya. Namun hal ini baru ditemukan setelah dirinya melakukan pengecekan ke beberapa kecamatan dan melakukan pertemuan langsung dengan puluhan Kades di beberapa kecamatan.

"Dari pertemuan dengan kades-kades itu, terbukti para pendamping desa di wilayah Poso hanya sekitar dua puluh persen yang melaksanakan tugasnya mendampingi desa dalam hal penggunaan dana desa. Dari pengakuan para Kades, para pendamping desa datang ke desa hanya ingin meminta laporan dari Kades melalui telepon dan datang meminta sspdnya ditandatangani Kades agar honorinya cair. Sebenarnya tugas dari pendamping desa itu adalah melakukan pendampingan kepada pemerintah desa terkait dengan perencanaan desa, penggunaan keuangan desa dan pertanggungjawaban dana desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Yan.

Terkait dengan hal ini, pihak Pemda Kabupaten Poso akan melaporkan persoalan pendamping desa di wilayah Kabupaten Poso kepada Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, agar ke depan terjadi kerja sama yang baik antara pendamping desa dan Kades. Sehingga terjalin harmonisasi kerja dalam meningkatkan kesejahteraan di desa melalui kucuran dana desa.

"Kami selama ini memang belum pernah menginformasikan terkait dengan kinerja pendamping desa ke Pemprov. Nanti dengan adanya hal ini kami segera akan menyurati Kepala Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah soal pendamping desa yang tidak aktif melaksanakan tugas mereka," katanya.

Sekaitan kinerja para pendamping desa di Kabupaten Poso menurut mantan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Poso, Andi Pontih, membenarkan bahwa sejak dirinya masih di Dinas PMD tahun 2018, para pendamping desa tersebut tidak aktif bekerja mendampingi desa sebagai tugas utama mereka.

"Memang pendamping desa sejak tahun 2018 saya masih di sana tidak aktif melakukan pendampingan desa. Dengan pihak dinas PMD Poso juga mereka jarang koordinasi. Dengan Kadespun jarang. Nanti akan meminta tandatangan SPPD baru mereka datang minta tandatangan Kades," ujar Andi.

(<https://kumparan.com/paluposo/sekretaris-kabupaten-poso-sebut-80-persen-pendamping-desa-tidak-aktif-1s0ZQcLLr5l/full>) Diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

Pemberitaan di atas mengisyaratkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso seiring dengan mewabahnya COVID-19, terdapat pula kendala lain yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso. Sebagai perangkat daerah khususnya pelaksana pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso, sudah seharusnya menjadi tugas dari Dinas PMD dalam membina dan mengawasi pendamping desa yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.

Penelitian dengan konteks pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso sebelumnya sudah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1.1
Perbandingan Hasil Penelitian yang dilakukan dengan penelitian
lainnya

No.	Peneliti/judul Penelitian	Temuan Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Risky Pusut, Marthen Kimbal, Michael Mamentu/ Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso	Pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Desa Pasir Putih menunjukkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan melalui pembangunan 10 los pasar Usaha Kecil Menengah dan pembuatan jalan tani.	a) Tema penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat b) Tipe penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif	a) Mengetahui strategi pemerintah desa membangun sektor pertanian. b) Mengetahui potensi dan kebutuhan masyarakat desa
2	Abdul Hamid Labaso/ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso	Penggunaan dana ADD yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	a) Tema penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat b) Tipe penelitian yaitu penelitian dengan metode deskriptif kualitatif	a) Mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
3	Fitria Y. Alim/ Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso	Implementasi Program Bantuan Sosial dan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso tidak efektif.	a) Penelitian dilakukan pada perangkat daerah Kabupaten Poso b) Tipe penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif	a) Mengetahui implementasi dan kendala program Bantuan Sosial Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso

Ketiga penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fokus masalah yang dilakukan peneliti sebelumnya mencakup strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, pengelolaan alokasi dana desa dalam

pemberdayaan masyarakat dan implementasi dari program bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum persamaan penelitian mencakup tema dan metode penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian untuk mendeskripsikan kinerja perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan desa dalam pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 adalah segala upaya yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan COVID-19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Poso sebagai perangkat daerah yang mendampingi dan mengawasi pemerintah desa mempunyai korelasi terhadap pelaksanaan program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso 2016-2021 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa. Dengan masalah terkait aksesibilitas dan yang terkini yaitu pandemi COVID-19, membuktikan adanya korelasi perangkat daerah dan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya kajian akademis terkait kinerja perangkat daerah dalam pemberdayaan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini meliputi :

1. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas PMD dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19?
2. Faktor apa yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kinerja

Menurut Afandi (2018:83) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Kemudian menurut Mangkunegara (2012:67) pengertian kinerja (prestasi kerja)

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Wibowo (2010:4) Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP dalam Abdullah, 2014:145). Sementara itu menurut Lohman dalam Abdullah (2014:145) indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi.

Moeheriono (2012:108) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *ouput* atau *outcome* suatu kegiatan.
- b) Indikator kinerja adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Amstrong dan Baron dalam Abdullah (2014:151), paling tidak ada tiga hal yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan indikator kinerja, yaitu :

- a. Apa yang diukur semata-mata ditentukan oleh apa yang dianggarkan.
- b. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi prioritas strategis dan rencana strategis yang mengindikasikan apa yang harus diukur.
- c. Memberikan perbaikan kepada karyawan maupun tim dengan mengukur hasil dari prioritas strategis, memberikan kontribusi untuk perbaikan lebih lanjut dengan mengusahakan motivasi karyawan dan tim, dan memberikan informasi apa yang sudah berjalan dan tidak berjalan. Dengan demikian tujuan ditetapkannya indikator kinerja itu adalah untuk memberikan bukti apakah hasil yang diharapkan telah tercapai atau belum.

Diperlukan adanya pengukuran kinerja seperti yang dikemukakan oleh Agus Dharma (2004:24) bahwa hampir semua pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuantitas, berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
2. Kualitas, berkaitan dengan mutu yang dihasilkan baik berupa kerapian kerja dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai.
3. Ketetapan waktu, yaitu sesuai apa tidak dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk menilai keberhasilan organisasi. Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto dkk, 2003).

a. Produktivitas

Konsep produktivitas yang dimaksud dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi dan juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, tetapi ini dinilai terlalu sempit, maka General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang penting.

b. Kualitas layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya tertuma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Artinya bahwa para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat tentunya akan mempresentasikan kepentingan rakyat.

Menurut Moeheriono (dalam Abdullah, 2014:151), terdapat enam ukuran indikator kinerja, namun masing-masing organisasi dapat saja mengembangkannya sesuai dengan misi organisasi tersebut. Keenam kategori tersebut antara lain:

- a. Efektif, mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b. Efisien, mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
- c. Kualitas, mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

d. Ketetapan waktu, mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.

e. Produktivitas, mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi.

f. Keselamatan, mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja pada karyawan ditinjau dari aspek kesehatan.

Selanjutnya, Secara etimologi pemerintah dapat di artikan sebagai berikut.

Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif,

legislative dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Pemaparan gagasan dan teori-teori di atas menyimpulkan bahwa peneliti memilih menggunakan teori yang digagas oleh Dwiyanto dan kawan-kawan yaitu pengukuran kinerja Dinas PMD Kabupaten Poso melalui dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas karena relevan dengan data-data yang diperoleh selama observasi di lapangan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Menurut Theresia (2015:64) pembangunan yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik. Riyadi dalam Pusut,dkk (2017:4) mengungkapkan adanya berbagai macam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak mengenai pembangunan, namun kesemuanya itu mengarah pada kesepakatan bahwa: pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Pengertian lain mengenai pembangunan juga dikemukakan oleh Mardikanto (2009:105) bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau

dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah, dengan menggunakan teknologi terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Adrian Leftwich dalam Winarno (2013:41) mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan ke dalam sembilan pendekatan pokok, yakni pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis, pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam, pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi, pembangunan sebagai suatu kondisi, pembangunan sebagai suatu proses, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sebagai perubahan struktural, pembangunan sebagai modernisasi, dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Dwi Iriani Margayaningsih (2018:164), dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik

tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat

yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukanlah hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pemberdayaan menurut Fahrudin (2012:16) merupakan suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Cara tersebut terdiri dari serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kemudian, dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Di bidang pendidikan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya keaksaraan atau pemberantasan 3-buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan dasar) dan pelatihan yang lain, sehingga mereka mampu menggali kearifan tradisional (*indigenous-technology*), dan mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakatnya.

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, merupakan proses “penyadaran” baik penyadaran tentang keberadaannya, masalah-masalah yang dihadapi, kebutuhan untuk memecahkan masalah, peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, serta penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri sendiri dan masyarakatnya. Menurut Gary S. Becker dalam Supsilani (2019:20-30) bahwa alat utama peningkatan produktivitas manusia itu adalah pendidikan. Modal manusia dikonsepsikan sebagai produktif secara ekonomis. Modal tersebut merupakan suatu jenis persediaan pengetahuan atau seperangkat keterampilan yang diperoleh di sekolah atau pekerjaan

melalui pelatihan dan pengalaman, tetapi manfaatnya meningkatkan nilai pegawai/karyawan di tempat kerja dan/atau produktivitas suatu organisasi tempat dia bekerja.

Pemberdayaan dalam bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai penyediaan layanan kesehatan dasar (terutama bagi kelompok miskin) yang mudah, cepat, dan murah dengan memanfaatkan pengobatan “modern” dan atau pengobatan tradisional yang teruji kemanjuran dan keamanannya. Pemberdayaan bidang kesehatan, juga menyangkut kemandirian masyarakat untuk mengorganisir lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM, KSM, PKK, Dasawisma, Posyandu, dll) untuk menanggulangi faktor resiko penyakit dan menghimpun iuran kesehatan, termasuk meningkatkan kemampuan untuk memerangi kapitalisasi medik yang lebih menekankan praktik-praktik kuratif dibanding preventif dan promotif..

Dalam dunia bisnis, pengertian power dikaitkan dengan kemampuan atau produktivitas. Karena itu, pemberdayaan atau *empowerment* diartikan sebagai proses peningkatan optimasi kemampuan atau produktivitas, individu, organisasi, ataupun sistem. Di pihak lain, power juga dapat diartikan sebagai keunggulan bersaing atau posisi-tawar (*bargaining position*). Karena itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai penguatan atau peningkatan keunggulan bersaing atau posisi tawar.

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa : modal, teknologi,

informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya (Sumodiningrat, 2003:27).

Di bidang sosial-politik, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan menurut Prasetyo (2015:124), berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*). Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan menguatkan *knowledge*, modal, dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal yang kuat akan menjamin *sustainable* didalam membangun rasa kepercayaan di masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to built the trust*).

b. Dilema Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, Ayu Mentari dan Sufi (2019:129) mengungkapkan dilema dalam pemberdayaan masyarakat saat ini yaitu banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin

tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap masalah pembangunan yang dihadapi. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Idrus (2009:43) penelitian lapangan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, dan organisasi masyarakat dan lembaga pemerintahan. Sedangkan spesifikasi penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menuliskan atau menggambarkan sesuatu hal di daerah tertentu atau pada kelompok tertentu atau pada saat tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian kalimat.

Metode deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan metode yang berupaya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemui di lapangan yang berhubungan dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Poso.

b. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian pada penelitian ini adalah kinerja perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Poso, dengan melakukan penelitian secara langsung guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. adapun lokasi penelitian bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena beberapa alasan diantaranya yaitu aksesibilitas data mudah dijangkau serta aspek ekonomis dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian masih kurangnya penelitian sejenis yang pernah dilakukan di lokasi tersebut.

d. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Adapun kriteria informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Orang yang terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso.
2. Orang yang menjadi pelaksana pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso.

Atas dasar kriteria tersebut, peneliti memilih dua orang informan dalam penelitian ini secara struktural yaitu Kepala Seksi Administrasi Umum Pemerintahan Desa, Ahdar Ismail, ST. M. Si , dan Bendahara Desa Bariri, Satrianlus Masoke, SH. Terdapat beberapa informan yang terlibat langsung akan tetapi menolak untuk dipublikasikan namanya tetapi untuk jabatan dapat penulis sampaikan yaitu tiga orang dari divisi Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Poso, Kepala Desa Torire serta bendahara, kemudian Sekretaris Desa Hanggira. Penolakan ini beralasan karena faktor politik yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Poso.

Pemilihan informan Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa berlandaskan bahwa pelimpahan wewenang terkait program-program dan penugasan dilimpahkan kepada Pak Ahdar Ismail selaku Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa untuk mewakili Kepala Bagian Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Poso.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi adalah teknik yang dilakukan peneliti untuk mengadakan pengamatan pada obyek secara langsung untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti tanpa terlibat di dalamnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan peneliti mengobservasi dengan menggali data-data dari pemberitaan dan program-program yang sudah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso terutama isu-isu strategis seputar pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso yang pertama melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian mengumpulkan info-info terkait masalah pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso termasuk pemberitaan yang hangat diperbincangkan terutama terkait produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas kinerja Dinas PMD Kabupaten Poso.

2. Wawancara yang dimaksud adalah pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penulis mewawancarai Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa, Ahdar Ismail, ST sebagai pelaksana utama program pemberdayaan di Kabupaten Poso. Kemudian mewawancarai beberapa perangkat desa untuk menghimpun informasi pendukung penelitian ini yaitu Kepala Desa Bariri, Magdalena Mentara dan Bendahara Desa Bariri, Satrianus Masoke.

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan dengan pengambilan gambar, video, dan audio sebagai bukti hasil penelitian dan data yang disajikan dalam temuan penelitian. Hasil wawancara yang telah dilakukan berupa video dan audio yang telah ditranskripsikan di lampiran. Gambar pendukung dalam penelitian yaitu foto bersama Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Poso dan Bidang Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso.

4. Teknik pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sebagaimana menurut Sugiyono (2014:83), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data-data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91) teknis

analisis data yang digunakan peneliti adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Reduksi data (*data reduction*) , adalah data yang diperoleh di lapangan dengan jumlah yang banyak, rumit, dan kompleks perlu di pilih hal-hal yang pokok dan dicatat secara teliti kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Data sebagaimana yang dimaksud berupa hasil cetak dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso yang didalamnya terdapat tabel serta uraian anggaran serta realisasi program-program yang dilaksanakan Dinas PMD Kabupaten Poso pada tahun 2020. Agar lebih terfokus akan data ini, peneliti mengambil data yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai kinerja intansi pemerintahan dari perspektif produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas dari intansi tersebut.

Penyajian data (*data display*), adalah penyajian data yang telah dipilih sebelumnya secara terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami seperti teks naratif atau tabel, grafik, dan sejenisnya. Untuk penyajian data agar lebih terorganisir, peneliti menggunakan tabel yang telah dijelaskan kembali kemudian menganalisis tabel-tabel tersebut kembali sesuai teori yang menjadi landasan penelitian ini. Terutama dalam menganalisis produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas dari Dinas Kabupaten Poso yang memiliki data yang banyak sehingga perlu untuk disajikan dengan tabel agar memudahkan proses untuk menganalisis hasil datanya.

Conclusion drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari proses sebelumnya. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan merangkum keseluruhan hasil analisis dari kinerja Dinas PMD Kabupaten Poso dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas serta faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas PMD Kabupaten Poso terkait pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso.

g. Validitas Data

Data yang berhasil diperoleh, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian yang harus diusahakan kebenarannya. Oleh karena itu harus dipilih cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dan diuji validitasnya melalui triangulasi. Guna menetapkan keabsahan data yang diperlukan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Moelong (2012:147) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan untuk mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara sesuai dengan menyepakati waktu terlebih dahulu tentu memberikan data yang valid, sehingga lebih kredibel.

BAB II
PROFIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Poso merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa.

1. Tugas Dinas PMD Kabupaten Poso

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso adalah membantu Bupati Poso melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.

2. Fungsi Dinas PMD Kabupaten Poso

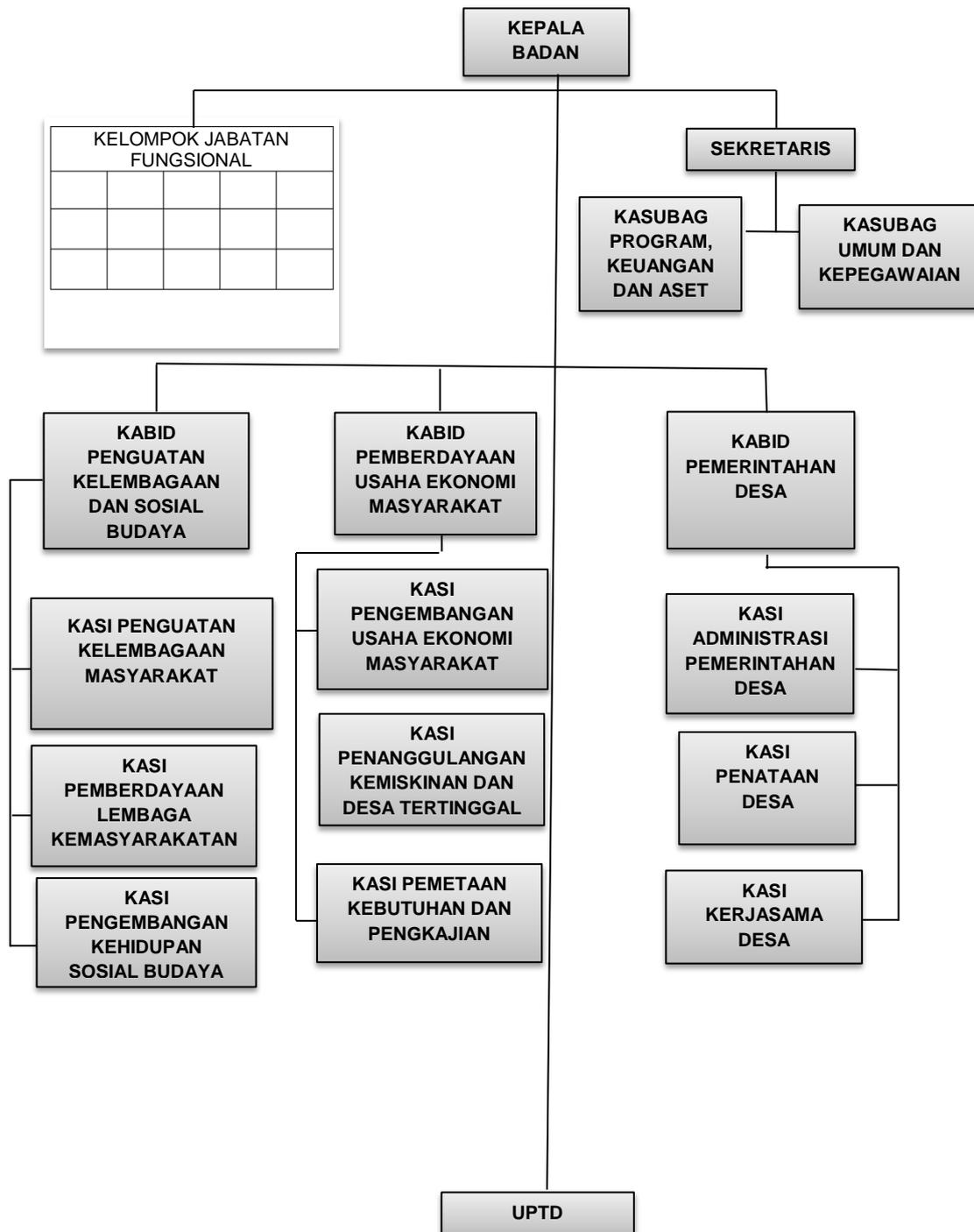
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Poso.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso adalah:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Poso

Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Poso adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Tugas:

Membantu kepala dinas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, asset, pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas;

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan asset, dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan asset, dan pengelolaan umum dan kepegawaian;
- c) Penyiapan bahan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan asset, umum, kepegawaian, dan rumah tangga;
- d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan asset, umum, kepegawaian, dan rumah tangga;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan dan asset, umum dan kepegawaian dan rumah tangga;
- f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian yaitu ;

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Tugas :

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan evaluasi serta pengatur penyelenggaraan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat .

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pengembangan kehidupan sosial budaya;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan kehidupan sosial budaya;
- c) Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya;
- d) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan urusan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan kehidupan sosial budaya;
- e) Perumusan pelaksanaan tugas teknis dan operasional di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

- f) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- g) Pemantauan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- h) Pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- 2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 3) Seksi Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Tugas :

Melakukan dan mengendalikan serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan desa tertinggal dan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan desa tertinggal dan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna ;

- c) Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan desa tertinggal dan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna;
- d) Perumusan pelaksanaan tugas teknis dan operasional di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e) Pemantauan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- f) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- g) Pembinaan penilaian kinerja bawahan serta sasaran kerja pegawai negeri sipil;
- h) Pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang ini dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 2) Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Desa Tertinggal;
- 3) Seksi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Tugas :

Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perencanaan, operasional, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pengaturan, pengevaluasian dan pelaporan tugas-tugas di bidang

pemerintahan desa yang meliputi seksi administrasi pemerintahan desa, seksi penataan desa dan seksi kerjasama desa.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan administrasi pemerintahan desa, penataan desa, dan kerjasama desa ;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan administrasi pemerintahan desa, penataan desa dan kerjasama desa ;
- c) Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan administrasi pemerintahan desa, penataan desa, dan kerjasama desa ;
- d) Penyiapan rencana kerja bidang untuk pedoman pelaksanaan tugas ;
- e) Pembagian tugas kepada seksi-seksi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- f) Pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan desa;
- g) Pelaksanaan tugas operasional bidang pemerintahan desa;
- h) Pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa; dan
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang ini di bantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
- 2) Seksi Penataan Desa;
- 3) Seksi Kerjasama Desa.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas :

Melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat pelaksanaan teknis operasional di lapangan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai bidang masing-masing.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan Fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Zanafa Publishing, Riau.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2003. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press, Yogyakarta
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga, Jakarta.
- Mangkunegara, A.A., & Anwar, P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardikanto, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Moehersono. 2012. *"Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi"*. Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prasetyo. 2015. Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. <https://prsfapet.wordpress.com//2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2020
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Alfabeta, Bandung.
- Theresia, A. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.
- Wibowo. 2010. *Budaya Organisasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, B. 2013. *Etika Pembangunan*. CAPS, Yogyakarta.

Sumber Jurnal:

- Alim, Fitria Y. 2019. *Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso*. Jurnal Ilmiah Administratie Volume 12 Nomor 1. Diunduh tanggal 17 Desember 2020
- Ayu Mentari dan Sufi. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*. Jurnal Ilmu Adminisrasi Bisnis Volume 2 Nomor 2. Diunduh tanggal 21 Desember 2020.
- Labaso, Abdul Hamid. 2018. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan*. Jurnal Ilmiah EKOMEN Volume 18 Nomor 1. Diunduh tanggal 18 Desember 2020
- Margayaningsih, Dwi Iriani. 2018. *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Publiciana Volume 11 Nomor 1, 2018. Diakses tanggal 15 Desember 2020.
- Miguel de Araujo, Ni Luh Putu Wiagustini, IB Anom Purbawangsa. 2018. *Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Volume 7. Diunduh tanggal 4 Maret 2021.
- Ni Putu Anik Prabawati dan Ni Wayan Supriliyani. 2020. *Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal JAPS Volume 1 No. 3. Diunduh tanggal 23 Desember 2021.
- Risky Pusut, Marthen Kimbal, Michael Mamentu. 2017. *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*. Jurnal Unsrat Volume 2 Nomor 2, 2017.
- Supsiloani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal*. Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Volume 5 Nomor 1. Diunduh tanggal 22 Desember 2020.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Lembaran negara republik Indonesia Nomor 6485.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384.

Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 14 April 2020 Nomor :1261/PRI.00/IV/2020.

Dinas PMD Kabupaten Poso. 2016. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso 2016-2021.

Sumber Internet:

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/18/140500965/peneliti--virus-corona-diduga-berasal-dari-penambang-china-pada-2012?page=all> diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

[https://www.posoline.com/index.php/2020/06/25/dinas-pmd-poso-beri-
pendampingan-pemdes-salurkan-blt-dd/](https://www.posoline.com/index.php/2020/06/25/dinas-pmd-poso-beri-
pendampingan-pemdes-salurkan-blt-dd/) diakses tanggal 8
Desember 2020.

[https://kumparan.com/paluposo/sekretaris-kabupaten-poso-sebut-80-persen-
pendamping-desa-tidak-aktif-1s0ZQcLLr5l/full](https://kumparan.com/paluposo/sekretaris-kabupaten-poso-sebut-80-persen-
pendamping-desa-tidak-aktif-1s0ZQcLLr5l/full). Diakses tanggal 22
Desember 2020.

Prasetyo. (2015). Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. Available At:
[https://prsfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-
pemberdayaan-masyarakat/](https://prsfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-
pemberdayaan-masyarakat/). Di Akses tanggal 21 Desember 2020.